

# Peran Represif Pemerintah Terhadap Kurang Meratanya Penyebaran Akses Pendidikan Hingga ke Pelosok Indonesia

Oleh

Bryan Alphariel Sutanto (Universitas Udayana)

Pendidikan merupakan sebuah panggilan moral bagi seorang atau sekelompok individu yang menuntut dan esensial untuk ditempuh. Sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang berpendidikan. Pembangunan terhadap bangsa, kesejahteraan kehidupan berbangsa, dan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu negara adalah dengan diperlukannya suatu pendidikan yang tersebar merata di dalam suatu negara tersebut.

Pemerataan pendidikan dalam suatu negara akan dapat terlaksana hanya jika segala upaya dan usaha yang telah diimplementasikan berjalan secara jujur, transparan, efektif, efisien, dan realistis terhadap kondisi suatu negara tersebut. Pemerataan pendidikan berperan aktif untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa yang tentunya merupakan posisi ideal bagi sebuah negara dalam aspek edukasi. Berbagai kondisi, dinamika, serta tantangan yang dihadapi oleh suatu negara untuk meratakan pendidikan terasa sulit dicapai. Tidak tercapainya persebaran dan pemerataan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi “bom waktu” bagi negara itu sendiri.

Mutlaknya, suatu bangsa atau negara tentunya memiliki komponen-komponen penyusun negara, salah satunya adalah rakyat itu sendiri. Masyarakat atau rakyat haruslah mendapatkan akses terhadap segala hak-hak yang mereka kehendaki sebagaimana mestinya. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak esensial yang harus digapai bagi semua orang tanpa memandang “bulu” dan golongan tertentu. Tanpa adanya akses terhadap pendidikan, masyarakat akan kehilangan “panggilan moral” tersebut yang nantinya akan berdampak buruk terhadap kedudukan suatu negara itu sendiri.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang berpendidikan. Suatu negara dapat diukur kemajuannya dengan menilai seberapa besar kesenjangan pendidikan yang ada pada negeri tersebut. Melihat pada kondisi Indonesia, Indonesia atau yang sering disebut dengan Nusantara, merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan total populasi sebesar 277.749.853 jiwa pada tahun 2022. Terlebih lagi, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan total jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau.

Melihat betapa *massive*-nya populasi Indonesia serta kondisi geografisnya, ini menimbulkan beberapa pertanyaan baru. Seberapa merata pendidikan di Indonesia sendiri? Seberapa besar kesenjangan pendidikan yang dialami oleh penduduknya? Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi dan mengeliminasi permasalahan pemerataan tersebut?

Masih terdapat cukup banyak masalah mengenai pemerataan pendidikan di bumi Nusantara ini. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang membentang luasnya dari Sabang sampai Merauke, masih terdapat banyak daerah terpelosok dalam negeri yang belum terjangkau dan memiliki akses bagi pendidikan itu sendiri. Masih banyak jiwa di Indonesia yang belum berkesempatan merasakan indahnya menimba ilmu untuk membuka peluang masa depan yang lebih cerah. Urgensi bagi pemerataan pendidikan adalah agar kehidupan rakyat dapat terjamin, sehingga negara akan menjadi sejahtera dan makmur. Di Indonesia, pendidikan bukanlah sekadar keinginan, melainkan suatu keharusan yang mendesak.

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”, merupakan sebuah kutipan terkenal dari salah satu tokoh tanah air, Najwa Shihab. Pemberdayaan SDM melalui pendidikan merupakan suatu amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; dan wajib belajar. Terlebih, mimpi Indonesia Emas 2045 melalui generasi muda juga merupakan suatu mimpi sekaligus mandat bagi seluruh komponen negara agar dapat bersinergi menyelesaikan masalah kesenjangan yang ada, dan untuk memberdayakan SDM lintas generasi dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Untuk pemerataan pendidikan, diperlukan adanya pembangunan infrastruktur. Tidak 100 persen daerah di Indonesia merupakan daerah yang dapat dijangkau dengan mudah. Hal ini membuat terpisahnya akses komunikasi dan koordinasi antar suatu daerah ke daerah yang lain. Pemerintah tentunya harus dapat mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan akses antar daerah dengan transparan, jujur, dan juga adil, serta dengan perbaikan dan pengadaan fasilitas-fasilitas penyokong edukasi yang sudah ada atau yang akan ada seperti gedung sekolah, akomodasi bersekolah bagi peserta didik, lancarnya distribusi informasi antar masyarakat, serta fasilitas pendukung seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya.

Pengadaan akses internet merupakan suatu atau sebuah langkah awal bagi pemerintah dalam rangka pembangunan fasilitas edukasi. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan pelaksanaan dan pemerataan pendidikan yang inklusif bagi segala golongan hingga sampai ke pelosok Nusantara secara efektif, efisien, aman, dan terakreditasi.

Selain pengadaan infrastruktur yang merata, pemerintah juga harus dapat mensejahterakan dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang ada. Untuk dapat bekerja di daerah terpelosok tentunya bukanlah suatu hal yang muncul tanpa adanya suatu tantangan. Mensejahterakan tenaga pengajar berarti pemerintah harus dapat menunjang segala kebutuhan mereka dengan cara memberikan tunjangan yang sesuai dengan tingkat kesulitan akses yang ada. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pemberdayaan terhadap tenaga pengajar melalui program-program yang dikarsai oleh lembaga pendidikan di Indonesia, atau Kemendikbud untuk menyelaraskan dan menyamakan kualitas tenaga pengajar di daerah dan juga di perkotaan. Dengan terjaminnya mutu kehidupan para tenaga pengajar, tentunya ini akan menambah kuantitas tenaga pengajar di daerah terpelosok, bersama dengan adanya pengadaan infrastruktur edukasi yang sudah disediakan oleh pemerintah itu sendiri.

Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki cerminan kondisi aspek sosial, budaya, agama, serta segala keberagaman yang ada di Indonesia melalui pembelajaran. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan kurikulum yang relevan dan berkaitan dengan kondisi Nusantara.

Ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh mahalnya biaya atau *cost* yang harus dipenuhi atau ditanggung oleh para peserta didik. Dengan alokasi dana yang optimal dan adil, pemerintah dapat memberikan dana bantuan dan subsidi bagi para penerima kesempatan menimba ilmu untuk dapat belajar tanpa harus memusingkan perihal biaya yang sudah di *cover* oleh pemerintah.

Dengan banyaknya dan tidak terjangkaunya daerah-daerah terpelosok yang ada di Indonesia, pemerintah atau instansi terkait harus dapat dan harus melakukan proses mediasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang masih asing dengan proses belajar-mengajar ini. Hal ini tentunya diharapkan agar lembaga pemerintahan akan dapat menjangkau secara menyeluruh lapisan kelompok masyarakat yang belum terjangkau.

Kita harus mengingat fakta bahwa sebuah negara tidak akan dapat dan tidak akan bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun hubungan baik terhadap rakyat dan bekerja sama dengan segala lembaga non-pemerintahan, yayasan, dan donatur-donatur yang mau

berkontribusi terhadap kemajuan dan pemerataan pendidikan bangsa Indonesia. Segala komponen penyusun bangsa harus dapat bersinergi, bekerja sama untuk meng-*establish* program-program yang revolusioner untuk mengarahkan pandangan pendidikan kita ke arah yang lebih baik.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan total pulau terbanyak dan dengan populasi yang sangat besar. Melihat kondisi tersebut, maka tak heran rasanya kita menghadapi berbagai dinamika berkehidupan berkebangsaan, serta menemukan adanya kesenjangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya sebagai respon represif menanggapi tantangan-tantangan tersebut.

Segala masalah dan kendala yang membayang-bayangi dan membuntuti upaya pemerataan pendidikan di Indonesia dapat ditanggulangi dan di eliminasi jika dan hanya jika ada keseriusan bukan hanya dari pemerintah, namun dari segala lembaga dan lapisan masyarakat untuk dapat bersinergi dan berintegritas dalam mewujudkan negara Indonesia yang maju dan berpendidikan dengan adanya pemberdayaan terhadap SDM, pengadaan infrastruktur dan perbaikan, Menjamin tenaga pengajar dan peningkatan kualitas atau mutu para tenaga pengajar, dibuatnya kurikulum yang relevan dari cerminan bangsa Indonesia, memberikan dana bantuan pendidikan, hingga proses mediasi jika diperlukan bagi para kelompok yang masih terpelosok demi terwujudnya ekspansi pendidikan yang optimal. Pemerintah harus dapat menjalin hubungan yang baik ke masyarakat untuk dapat merangkul segala pihak. Namun pada akhirnya, peningkatan kualitas bangsa dan percobaan meratakan edukasi pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia.

## REFERENSI

Parinduri, D. A. (2021). *Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. Kabar Pendidikan.  
<https://www.kabarpendidikan.id/2021/06/pemerataan-pendidikan-di-indonesia.html>

Wikipedia. (2024). *Indonesia*. Wikipedia  
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indonesia&action=history>

Putra Nangroe, T. (2022). *Kebijakan Pemerintah terkait Pemerataan Pendidikan di Pelosok Negeri*. Kompasiana.  
<https://www.kompasiana.com/tegarputranangroe5939/639c544a2d107e35376ff1c2/kebijakan-pemerintah-terkait-pemerataan-pendidikan-di-pelosok-negeri>